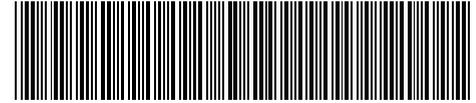




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692062/2025**



DS:7709-9930-0899-1762

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 01

Tanggal : 21 Februari 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 3. Provinsi : (25) PAPUA
 4. Kode/Nama Satker : (692062) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA
- Sebesar : Rp. 2.045.065.000 (DUA MILIAR EMPAT PULUH LIMA JUTA ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
135.04.BF.7110 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 2.045.065.000
Rp. 2.045.065.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	2.045.065.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAYAPURA (063) Rp. 2.045.065.000

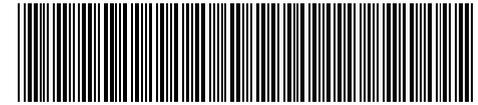
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692062/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7709-9930-0899-1762

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (692062) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

Halaman : I A. 1

Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2.045.065.000
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			2.045.065.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan			
		2. 01	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah			
		3. 01	Persentase Permohonan Layanan BHP yang diselesaikan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	5,00	layanan	1.192.467.000
Rincian Output	:	01 BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	4,00	layanan	1.093.703.000
		02 BAH.003	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah	1,00	layanan	98.764.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga	1,00	Perkara	43.364.000
Rincian Output	:	01 BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	1,00	Perkara	43.364.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	3,00	Lembaga	809.234.000
Rincian Output	:	01 BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah	3,00	Lembaga	809.234.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 135.04.2.692062/2025

I B. SUMBER DANA



DS:7709-9930-0899-1762

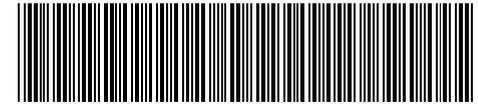
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 Provinsi : (25) PAPUA
 Kode>Nama Satker : (692062) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

		Pagu	Ekuivalen Rupiah			
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	2.045.065.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$ 0 Rp.	0
2. PNPB	Rp.	2.045.065.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692062/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7709-9930-0899-1762

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (692062) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692062	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA	-	2.045.065	-	-	-	2.045.065		
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.045.065	-	-	-	2.045.065		
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	2.045.065	-	-	-	2.045.065		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	1.192.467	-	-	-	1.192.467	25 . 51	
04	PNBP	-	1.192.467	-	-	-	1.192.467	063@	
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	43.364	-	-	-	43.364	25 . 51	
04	PNBP	-	43.364	-	-	-	43.364	063@	
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	809.234	-	-	-	809.234	25 . 51	
04	PNBP	-	809.234	-	-	-	809.234	063@	
JUMLAH		-	2.045.065	-	-	-	2.045.065		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692062/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7709-9930-0899-1762

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (692062) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692062	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	50.000	50.000	170.346	170.346	170.346	170.346	170.346	170.346	170.346	170.346	582.297	2.045.065
		BELANJA BARANG	0	50.000	50.000	170.346	170.346	170.346	170.346	170.346	170.346	170.346	170.346	582.297	2.045.065
	135.04.BF.7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	50.000	50.000	170.346	170.346	170.346	170.346	170.346	170.346	170.346	170.346	582.297	2.045.065
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	50.000	50.000	170.346	170.346	170.346	170.346	170.346	170.346	170.346	170.346	582.297	2.045.065

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692062/2025
IV A. B L O K I R**



DS:7709-9930-0899-1762

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [692062] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692062	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 1.429.265		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 1.429.265	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 63.042
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		522141 Belanja Sewa(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 44.500		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.000
	Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025		Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522141 Belanja Sewa(PNBP)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.020
	Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		521211 Belanja Bahan(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 47.300
	Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025		Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 548.983		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 151.400
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		522141 Belanja Sewa(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.960		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.500
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)		522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 38.326		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692062/2025
IV A. B L O K I R**



DS:7709-9930-0899-1762

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [692062] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

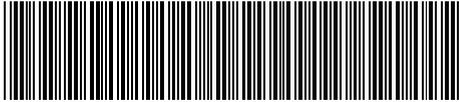
Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		KODE	URAIAN
	Tidak Dapat Dicairkan Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 4.000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)			
	Tidak Dapat Dicairkan Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 371.506		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)			
	Tidak Dapat Dicairkan Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 11.040		
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)			
	Tidak Dapat Dicairkan Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 83.688		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692062/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:7709-9930-0899-1762

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [692062] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO